

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, PENEGAKAN PERATURAN, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*)(Studi Kasus: Pada BUMD Di Kabupaten Buleleng)

¹Putu Deby Purnama Sari, ¹Gede Adi Yuniarta,²Putu Julianto

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: [1debypurnama123@gmail.com](mailto:debypurnama123@gmail.com), [1gdadi_ak@yahoo.com](mailto:gdatedi_ak@yahoo.com), [2putujulianto@undiksha.ac.id](mailto:putujulianto@undiksha.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Populasi pada penelitian ini adalah empat Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng dengan jumlah karyawan 145 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 68 orang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda berbantuan program SPSS versi 24,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun saran yang diberikan kepada manajemen Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng agar mengevaluasi kinerja karawan dalam mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dengan memperhatikan sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu. Selain itu, agar setiap rapat kerja segala bentuk informasi yang dimiliki oleh atasan maupun pegawai diungkapkan pada saat rapat berupa laporan harian atau mingguan. Serta bagi penelitian selanjutnya untuk menambah subyek penelitian dan variabel yang mungkin mempengaruhi kecenderungan kecurangan.

Katakunci : kecenderungan kecurangan, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, moralitas individu

Abstract

This study discusses the influence of the internal control system, enforcement of regulations, and individual morality on fraud in the Regional Owned Enterprises of Buleleng Regency. The population in this study is the Buleleng Regency Business Entity with 145 employees. The sampling technique uses a purposive sampling with the tertiary criteria so that a sample of 68 people is obtained. This research is a quantitative study consisting of data in the form of numbers or qualitative data that are predicted. The data source used is primary data obtained from distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique used multiple regression analysis assisted by the SPSS version 24.0 program. The results showed that the internal control system, regulatory enforcement, and individual morality had a negative and significant effect on fraud in the Buleleng Regency-Owned Enterprise. Suggestions given to the management of the Buleleng Regency-Owned Business Entity in order to increase the budget for accountability by considering the internal control system, enforcement of

regulations, and individual morality. Other than that, so every work meeting all information requested by superiors or employees is approved when the meeting contains daily or weekly reports. So further research to add research subjects and variables that might influence fraud.

Keywords : fraudulent tendencies, internal control systems, enforcement of regulations, individual morality

PENDAHULUAN

Di Indonesia, korupsi merupakan istilah asosiasi untuk menggambarkan praktek-praktek *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dan aparatur pemerintahan menurut UU No. 20 tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tindakan *fraud* untuk mendapatkan keuntungan bagi suatu organisasi atau badan, dapat dilakukan oleh orang dalam atau orang luar organisasi. Namun, kecurangan sering kali dilakukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam suatu perusahaan dan merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan kecurangan memiliki risiko kerugian keuangan karena perusahaan akan mengalami kebangkrutan apabila perusahaan (badan) tersebut terlibat dalam kecurangan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 (pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah), dimana pengertian dari Otonomi Daerah adalah kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indikasi kecurangan pada pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dengan ruang gerak secukupnya untuk dapat mengelola daerahnya sendiri agar dapat memaksimalkan potensi serta sumber daya yang dimiliki, menjalankan pemerintah daerah dan mampu bekerjasama serta profesional. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) salah satu organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi kesatuan produksi yang mampu menciptakan nilai tambah. BUMD dapat menjadi suatu usaha yang dikelola secara profesional serta mampu menciptakan keuntungan dan menjadi kontribusi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) itu sendiri. BUMD dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan daerah

dengan memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan meningkatkan penghasilan Pemerintah Daerah.

Peneliti dari IWC (2014) mengungkapkan bahwa tidak ada dana yang dapat lepas dari cengkaman kasus kecurangan dilakukan dalam berbagai organisasi baik profit maupun nonprofit, perusahaan, lembaga non keuangan maupun lembaga keuangan nonbank. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah dalam pengalokasian biaya operasional yang seluruhnya berasal dari hasil jasa layanan, gaji dan honor, pembangunan dan rehabilitas, pengadaan sarana prasarana penunjang. Namun kasus kecurangan paling rentan terjadi pada perbankan atau lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya langsung berhubungan dengan uang atau transaksi keuangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam *Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse* (2012) yang menyatakan bahwa industri-industri yang paling umum dan sering menjadi korban kecurangan adalah jasa keuangan dan perbankan, administrasi publik dan pemerintah, serta manufaktur (Priantara, 2013).

Menurut data yang dipublikasikan oleh KPK Per 31 Agustus 2016, penanganan tindak pidana korupsi lebih banyak ditemukan di kementerian/Lembaga sebanyak 26 perkara, Pemerintah Provinsi sebanyak 13 perkara, DPR dan DPRD sebanyak 11 perkara, dan BUMD dan BUMN sebanyak 6 perkara. Beberapa kasus yang terjadi di Bali yaitu kasus dugaan korupsi upah pungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Polres Buleleng dan Kodim 1609 Buleleng menahan Mantan Bupati Buleleng I Putu Bagiada yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Singaraja dalam kasus dugaan korupsi upah pungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak tahun

2005-2012 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 11 miliar (Kaskus.com).

Selanjutnya dilansir dari situs berita online Nusa Bali yang diposting pada tanggal 5 September 2018 menyatakan bahwa di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Buleleng 45 salah satu Customer Service (CS) di kantor Kas Seririt, Putu Ayu Aryandri, 41 tahun asal Banjar Lebah, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar ditangkap polisi karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi yang menggelapkan uang nasabah sebesar Rp 635,3 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Ayu Aryandri dikenakan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berdasarkan beberapa kasus diatas kecurangan sering terjadi pada dinas pemerintahan. Hal itu tentu sangat memprihatinkan karena perusahaan daerah yang seharusnya dapat dipercaya oleh rakyat justru memanfaatkan jabatannya untuk perbuatan yang salah.

Pengendalian intern yang efektif sangat diperlukan agar perusahaan mampu mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Perusahaan (badan) harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam perusahaan (badan) tersebut. dan kasus kecurangan sering terjadi pada sektor pemerintahan, maka BUMD diharapkan agar semakin baik dan profesional dalam melaksanakan usahanya. Menurut Wilopo (2006), kecurangan dapat disebabkan oleh lemahnya pengendalian intern. Jika suatu pengendalian intern lemah maka akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya, informasi yang ada tidak diteliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisien dan efektifnya kegiatan-kegiatan operasional serta tidak dapat dipatuhinya kebijakan kepala daerah dan perundang-undangan yang ditetapkan. Pernyataan tersebut diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan Wilopo (2006) yang menemukan bahwa pengendalian internal yang efektif

memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal semakin tinggi pengendalian internal yang ditunjukkan maka semakin rendah pula frekuensi kecurangan yang terjadi. Pengendalian internal telah tercapai apabila terus mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan dan prosedur yang telah dibuat secara berkesinambungan. Sistem pengendalian internal perusahaan yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat mengakibatkan munculnya *fraud* di lingkungan perusahaan (badan). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₁: Pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Dalam suatu organisasi ataupun perusahaan pasti selalu saja terjadi ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh karyawan maupun orang lain. Biasanya perusahaan memiliki aturan, menurut Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan. Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan pentingnya penegakan peraturan akuntansi merupakan kepatuhan kepada aturan-aturan ataupun standar yang mengikat perusahaan untuk tunduk pada ketentuan yang berlaku sehingga laporan keuangan menyajikan keadaan dan kondisi yang semestinya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₂: Penegakan peraturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif

terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Faktor lain yang berkaitan dengan tindak kecurangan akuntansi adalah tingkat moralitas individu karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran Moral Individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan Kecurangan Akuntansi (Wilopo, 2006 dalam Puspasari, 2012). Kecenderungan kecurangan sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), perilaku ilegal menjadi bagian dari perilaku tidak etis, sehingga perlu adanya ketentuan hukum yang mengikat sebagai salah satu usaha penegakkan standar Moralitas Individu agar kehidupan masyarakat seluruhnya dapat terjaga. Hernandez dan Groot (2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa lingkungan pengendalian akuntansi dan etika seseorang merupakan dua hal yang saling berkaitan dengan kecenderungannya dalam melakukan suatu Kecurangan Akuntansi. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H₃: Moralitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecuranga (*fraud*).

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis korelasi pengendalian internal, penegakan peraturan dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buleleng.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buleleng. Populasi pada penelitian ini adalah empat BUMD di Kabupaten Buleleng meliputi Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Pasar, Perusahaan Daerah Swantantra, dan

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 45 dengan jumlah karyawan 145 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria karyawan bagian keuangan di pemasukan dan pengeluaran kas serta telah bekerja minimal 2 tahun, dengan demikian didapatkan sampel sebanyak 68 orang.

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan menggunakan beberapa uji statistik, yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas), dan uji hipotesis (uji koefisien determinasi dan uji statistik t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dinyatakan bahwa data sistem pengendalian internal memiliki skor minimum 32 dan skor maksimum 45. Skor rata-rata 39,05 dengan standar deviasi 3,97. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data sistem pengendalian internal dalam penelitian ini terdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi.

Data penegakan peraturan memiliki skor minimum 20 dan skor maksimum 30. Skor rata-rata 25,11 dengan standar deviasi 2,43. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data penegakan peraturan dalam penelitian ini terdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi.

Data moralitas individu memiliki skor minimum 13 dan skor maksimum 20. Skor rata-rata 16,81 dengan standar deviasi 1,65. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data moralitas individu dalam penelitian ini terdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi.

Data kecenderungan kecurangan (*fraud*) memiliki skor minimum 8 dan skor maksimum 15. Skor rata-rata 11,73 dengan

standar deviasi 1,72. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data kecenderungan kecurangan (*fraud*) dalam penelitian ini terdistribusi merata, artinya selisih data satu dengan data yang lainnya tidak terlalu tinggi.

Selain uji statistik deskriptif juga dilakukan uji validitas. Setiap butir pertanyaan pada kuesioner digunakan analisis item yang mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai signifikansi ($\text{Sig.} < \alpha = 0,05$) (Ghozali, 2011). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson's Correlation* dengan bantuan program SPSS 24.0 for Windows. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,478 - 0,861 dan nilai signifikan sebesar 0,000, instrumen variabel penegakan peraturan memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,553 - 0,766 dan nilai signifikan sebesar 0,000, instrumen variabel moralitas individu memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,662 - 0,800 dan nilai signifikan sebesar 0,000, dan instrumen kecenderungan kecurangan memperoleh nilai *pearson correlation* sebesar 0,655 - 0,655 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan dinyatakan valid.

Uji kualitas data yang selanjutnya dilakukan adalah uji reliabilitas. Uji Reliabel berarti bahwa instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009). Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien *Alpha Cronbach*, yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan bahwa

variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,880, variabel penegakan peraturan memperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,774, variabel moralitas individu memperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,752, dan variabel kecenderungan kecurangan memperoleh nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,712. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan (*fraud*) adalah reliabel.

Setelah uji kualitas data terpenuhi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas sebaran data dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Uji normalitas data dilakukan pada *unstandardized residual* pengaruh sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*). Hasil uji normalitas data dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data pada penelitian ini mempunyai distribusi normal, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel yang lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan variabel independen memperoleh nilai toleransi berkisar 0,449 – 0,498 dan nilai VIF berkisar 2,008 – 2,226. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10.

Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikan variabel independen berkisar 0,663 – 0,968. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual* (ABS) lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dapat diketahui persamaan garis regresi dengan menggunakan analisis konstanta dan koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta serta hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28,198	1,406		20,056	0,000
X ₁	-0,142	0,044	-0,329	-3,267	0,002
X ₂	-0,220	0,075	-0,312	-2,954	0,005
X ₃	-0,321	0,110	-0,309	-2,913	0,005

a. *Dependent Variable: Y*

Sumber: Data Diolah, 2019.

Berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada Tabel 1 maka didapatkan hasil persamaan regresi yang disajikan sebagai berikut.

$$Y = 28,198 - 0,142X_1 - 0,220X_2 - 0,321X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut. Konstanta 28,198 menunjukkan jika variabel sistem pengendalian internal (X₁), penegakan peraturan (X₂), moralitas individu (X₃) bernilai konstan, maka variabel kecenderungan kecurangan (Y) memiliki nilai 28,198 satuan.

Sistem pengendalian internal (X₁) memiliki koefisien regresi -0,142. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X₁) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan sistem pengendalian internal (X₁) dapat menurunkan kecenderungan kecurangan (Y) sebesar 0,142 dengan

asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Penegakan peraturan (X₂) memiliki koefisien regresi -0,220. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa penegakan peraturan (X₂) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan penegakan peraturan (X₂) dapat menurunkan kecenderungan kecurangan (Y) sebesar 0,220 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Moralitas individu (X₃) memiliki koefisien regresi -0,321. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa moralitas individu (X₃) berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan moralitas individu (X₃) dapat menurunkan kecenderungan kecurangan (Y) sebesar 0,321 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

Selanjutnya uji Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), yang ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R Square*. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R Square* karena dianjurkan digunakan pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *adjusted r square* sebesar 0,686. Hal ini mengandung arti bahwa 68,6% variasi kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh variasi sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu, sedangkan sisanya 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan atau diuji pada penelitian ini.

Terakhir dilakukan uji statistik t (uji parsial) yang digunakan untuk menentukan analisis pengaruh sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) secara parsial, dimana dapat dilihat dari besarnya nilai probabilitas pada uji t.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan negatif uji t sebesar 0,002, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa penegakan peraturan memiliki nilai signifikan negatif uji t sebesar 0,005, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa moralitas individu memiliki nilai signifikan negatif uji t sebesar 0,005, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,142 dengan nilai signifikansi negatif uji t sebesar 0,002. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Pengendalian Internal merupakan sebuah sistem yang terdiri dari prosedur dan pembentukan kebijakan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya agar manajemen semakin yakin dalam rangka usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan atau entitas tersebut (Elder, Randal J. *et al.*, 2012:316). Penyimpangan yang masih ditemukan dalam laporan keuangan mengindikasikan laporan keuangan tersebut masih belum memenuhi karakteristik penilaian laporan keuangan yang baik. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Saputra, 2009).

Pengendalian internal yang efektif sangat diperlukan agar perusahaan mampu mengatasi ancaman bisnis yang mengitarinya. Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang lemah akan menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat mengakibatkan munculnya *fraud* di lingkungan perusahaan (badan). Jika sistem pengendalian internal lemah, maka akan menyebabkan tidak terdeteksinya kecurangan atau ketidakakuratan proses akuntansi yang berimplikasi terhadap bukti administrasi yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Winidyaningrum, 2009). Seperti penelitian

yang dilakukan oleh Prapto (2010) menunjukkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nadya (2016) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pengendalian internal dan moralitas individu terhadap kecurangan akuntansi pada pegawai bagian keuangan dan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurut penelitian serupa juga dilakukan oleh Kusumastuti (2012) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hal tersebut dikarenakan pemimpin yang cenderung berbeda-beda dalam suatu organisasi perusahaan yang akan menentukan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemimpin dalam mengelola perusahaan. Dengan jabatannya sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan, kemungkinan dapat melakukan tindakan kecurangan tanpa memperhatikan prosedur di perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauwzi (2011) juga menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi artinya pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pengendalian internal yang baik dan memadai maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang ada di organisasi perusahaan.

Pengaruh Penegakan Peraturan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,220 dengan nilai signifikansi negatif uji t sebesar 0,005. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Adanya peningkatan ketaatan pada penegakan peraturan akuntansi pada sebuah perusahaan atau instansi dapat mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi, yang nantinya akan membantu perusahaan untuk menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan secara objektif kepada pihak yang berkepentingan. Selain moralitas manajemen yang tinggi juga didukung dengan ketaatan penegakan peraturan yang berlaku, sehingga penegakan peraturan tersebut dapat membentuk manajemen yang tinggi dan dapat menurunkan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vani Adelin (2013) yang menunjukkan bahwa penegakan peraturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN di Kota Padang. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Shintadevi (2015) hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh dan signifikan antara ketaatan aturan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening.

Sebagai kejahatan yang berhubungan dengan orang, *fraud* tidak dapat dihilangkan dan selalu terjadi menurut kadar dan proporsi tertentu. Untuk menjaga kestabilan tersebut, perlu dilakukan penegakan peraturan secara konsisten dan tegas bagi pelanggar peraturan yang bertujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang sekaligus memberikan efek jera. Semakin tinggi persepsi pegawai terhadap penegakan peraturan, maka dapat menekan terjadinya *fraud*. Teori ini didukung oleh hasil penelitian Najahningrum (2013). Namun, teori dan temuan tidak didukung dengan hasil penelitian Pramudita (2013) dan (Zulkarnain 2013). Umumnya, mereka mengemukakan bahwa penegakan peraturan tidak dapat menekan *fraud* yang disebabkan para pejabat cepat tanggap dalam menangani pelanggaran instansi sehingga penanganan pelanggaran instansi tepat pada waktunya (Zulkarnain 2013).

Pengaruh Moralitas Individu Terhadap

Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,321 dengan nilai signifikansi negatif uji t sebesar 0,005. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Faktor lain yang berkaitan dengan tindak kecurangan akuntansi adalah tingkat moralitas individu karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Moral merupakan hal yang sesuai dengan keyakinan umum yang diterima masyarakat, berkaitan dengan penilaian norma tindakan manusia. Semakin tinggi level penalaran Moral Individu, maka akan semakin cenderung untuk tidak melakukan Kecurangan Akuntansi (Wilopo, 2006 dalam Puspasari, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Afri (2017) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kecenderungan Kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian ini juga dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prawira (2014), yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Penelitian ini juga berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi. Artinya, semakin tinggi tahapan moralitas individu (tahapan *post-conventional*), maka semakin individu tersebut memperhatikan kepentingan yang luas dan universal daripada kepentingan organisasi semata, apalagi kepentingan individualnya. Dengan demikian, semakin tinggi moralitas individu, maka semakin berusaha individu untuk menghindarkan diri dari kecurangan akuntansi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil uji dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,142 dengan nilai signifikansi uji t 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (2) Penegakan peraturan berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,220 dengan nilai signifikansi uji t 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (3) Moralitas individu berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*), yang ditunjukkan dengan koefisien regresi negatif sebesar -0,321 dengan nilai signifikansi uji t 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, yaitu: Pertama, bagi manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Buleleng, sebaiknya mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi agar lebih memperhatikan sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, dan moralitas individu. Selain itu, manajemen BUMD di Kabupaten Buleleng disarankan agar setiap dilakukan rapat kerja segala bentuk informasi yang dimiliki oleh atasan maupun pegawai diungkapkan pada saat rapat berupa laporan harian atau mingguan. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir terjadi kecurangan yang diakibatkan adanya informasi yang ditutup-tutupi antara atasan dengan pegawai. Kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah BUMD tidak hanya yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi. Serta berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,686. Hal ini menunjukkan bahwa 68,6% variabel

kecenderungan kecurangan (*fraud*) dipengaruhi oleh variabel sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, moralitas individu, sedangkan 31,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (*fraud*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afri, Ade, 2017. *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Moralitas dan Motivasi Terhadap Kecenderungan Akuntansi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Elder, Randal J. et al. 2012. *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauwzi. 2011. *Analisis Pengaruh Kefektifan Pengendalian Internal, Persepsi Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi UNDIP
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hernandez, J. R. dan T. Groot. 2007. *Corporate Fraud: Preventive Controls Which Lower Corporate Fraud*. Amsterdam : Research Centre in Accounting.
- Najahningrum, Anik Fatun. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No3.
- Nadya, Dionisia. 2016. *Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Eksperimen pada Pegawai Bagian Keuangan dan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta)*. Skripsi. Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nusabali. 2018. "Peristiwa Penggelapan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Buleleng 45". Dilansir pada <https://www.nusabali.com/index.php/berita/37258/gelapkan-uang-nasabah-rp-635-juta-costumer-service-ditangkap> (diakses tanggal 06 September 2018).
- Prapto, Susilo. 2010. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterlaksanaan dan Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sragen*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Puspasari. 2012. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen pada Konteks Pemerintahan Daerah*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing and Investigation*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prawira, I Made Darma. 2014. *Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buleleng)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha
- Rahmawati, Ardiana Peni. 2012. *Analisis Faktor Internal dan Moralitas Manajemen terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Shintadevi, Prekanida Farizqa. 2015. *Pengaruh Kefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis*

Sebagai Variabel Intervening pada Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi. Jurusan

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan BUMD di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.

Winidyaningrum, Celviana. 2009 *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterlaksanaan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.